



Kasus PIPANISASI di Karangasem

Jaksa Eksekusi Dana Rp 3,7 Miliar

Mangupura (Bali Post) -

Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem melakukan eksekusi terhadap dana uang pengganti. Eksekusi dilakukan sidang kasus pipanisasi Karangasem yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (31/1) kemarin. "Ya, tadi (kemarin - red) sudah kami lakukan eksekusi uang pengganti dalam kasus pipanisasi Karangasem," ucap Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan bersama jaksa eksekusi Wayan Suardi.

Dijelaskannya, eksekusi uang pengganti kerugian keuangan negara hingga Rp 3,7 miliar, kali ini bukan dalam bentuk uang gelondongan. "Polanya tadi (kemarin - red) ditransfer BG dari Bank Mandiri ke kas negara di Bank BRI," sambung Suardi.

Bagaimana dengan tersangka lainnya yang sempat diumumkan Polda Bali? "Soal tersangka lain, tanyakan ke Polda saja," ucap Suardi.

Namun saat disinggung soal SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dikatakan Suardi, jika memang itu ada dan SPDP sudah masuk kejaksaan, seharusnya ada pemberitahuan ke pihak kejaksaan. "Biasanya jika itu SP3, ya... ada pemberitahuan ke kita," lanjut Suardi. Namun untuk kasus pipanisasi Karangasem, dia belum mengetahui apakah pemberitahuan dari Polda Bali soal SP3 itu ada atau tidak.

Dalam kasus pipanisasi ini, sejumlah tersangka sudah beralih status menjadi terpidana. Terakhir yang masuk penjara karena terbukti bersalah adalah pimpinan proyek (pimpro) dari PT Adhi Karya, Parno Tris Hadiono. Dia divonis satu tahun penjara. Pekerjaan konstruksi jaringan air bersih dan air minum di empat kecamatan di Karangasem ini menggunakan APBD Karangasem tahun 2009-2010 senilai Rp 29 miliar. Konstruksi jaringan air bersih dan air minum ini sendiri terbentang sepanjang 60 kilometer yang meliputi Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu. Selain itu, Nv sebagai pengawas juga sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali.

Selain Parno, tiga orang yang sudah divonis bersalah adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem I Wayan Arnawa. Di tingka Mahkamah Agung (MA) ia divonis empat tahun dan sekarang dalam tahap Peninjauan Kembali (PK). Dua orang lainnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I.B. Oka divonis 1 tahun dan Kepala PT Adhi Karya Imam Wijaya Santosa. (kmb37)

Edisi : Rabu, 1 Feb 2017

Hal : 3



Masih Berproses, Hibah Tanah dan Gedung Kejari

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mulai memproses hibah dan gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung yang bakal dibangun di Mengwi. Hibah yang diberikan kabupaten terkaya di Bali ini menggunakan sebagian lahan Terminal Mengwi. Kabag Perlengkapan dan Perawatan Setda Badung I Wayan Puja saat dimintai konfirmasi, membenarkan jika hibah tanah dan gedung Kejari di Badung masih berproses.

Selain untuk kantor Kejari Badung, Terminal Mengwi seluas 11 hektar itu juga akan dibagi lagi menjadi tempat pengujian kendaraan bermotor (PKB) menggantikan tempat pengujian yang selama ini ada di wilayah Denpasar. "Kalau tidak salah nanti diambil untuk kantor Kejari 1 hektar dan tempat pengujian 5 hektar. Untuk ini sudah pasti menggunakan sebagian lahan Terminal Mengwi, hanya semua masih berproses," ujar Wayan Puja, Selasa (31/1) kemarin.

Mantan Camat Kuta Selatan ini mengatakan, sertifikat lahan semua masih atas nama Pemkab Badung. Namun, penghibahan masih terus berproses. "Untuk penghibahan tanah dan gedung harus ada persetujuan lembaga DPRD Badung," katanya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba. Ia mengakui bahwa pembangunan kantor Kejari Badung akan

menggunakan sebagian lahan Terminal Mengwi. "Kami masih menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Setelah itu jadi, baru kami tenderkan. Kami juga masih berproses itu (pembangunan gedung Kejari-red)," ujarnya.

Pihaknya kini masih menggodok rancangan gedung, mulai dari biaya hingga desain bangunan. "Kami juga harus berkonsultasi dengan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) yang di-lead-

ing-sector-i Kejari Denpasar," katanya.

Terkait tender, Surya Suamba menargetkan sudah dilakukan pada bulan Februari dengan estimasi anggaran sekitar Rp 31 miliar. Sumber dana berasal dari APBD Badung. "Rencana bangunan (gedung Kejari-red) tiga lantai lengkap dengan rumah dinas Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Untuk tender, target kami bulan Februari ini dan kalau pagu anggaran sekitar Rp 31 miliar," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 1 Feb 2017

Hal : 3